

BAB III

PERKEMBANGAN KONFLIK SENGGKETA LAUT CHINA SELATAN

Pada bab ini, menjelaskan bagaimana isu internasional muncul dan menjadi fokus utama beberapa negara. Seperti Kawasan Laut China Selatan telah mencuri perhatian banyak negara. Setiap negara berupaya untuk dapat menguasai kawasan perairan tersebut dan pada akhirnya menimbulkan konflik perebutan territorial, sehingga menimbulkan ketegangan internasional. Pada bab inilah akan didapat berbagai fakta dan informasi geografi Laut China Selatan, sejarah dan perkembangan sengketa Laut China Selatan serta keterlibatan Jepang di Laut China Selatan.

A. Kondisi Geografi, Sejarah Sengketa Laut China Selatan

Perairan Laut China Selatan selama ini telah menjadi primadona di kawasan Asia Pasifik yang banyak mencuri perhatian bagi berbagai negara. Perairan Laut China Selatan banyak dikelilingi oleh karang-karang yang apabila air laut mengalami pasang air, maka karang tersebut akan hilang. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kandungan yang berada di dalam perairan tersebut. Keinginan untuk memiliki kawasan Laut China Selatan menjadi fokus utama banyak negara dan terus berkembang menjadi konflik yang sulit dihindari. Upaya untuk menetapkan batas-batas antar negara di perairan Laut China Selatan merupakan hal yang bersifat konfliktual sebab hal ini menyangkut masalah kedaulatan sebuah negara. Begitu pula yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara, Salah satu konflik territorial yang tidak dapat dihindari terjadi di Kepulauan Laut China Selatan.

1. Kondisi Geografis Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan *semi enclosed sea* yang menghubungkan antara samudra hindia dan pasifik serta terletak di antara Asia daratan dan Kepulauan. Berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan disebelah utara, sebelah barat ke selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia Barat, sebelah timur berbatasan dengan Filipina dan sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia Timur, Malaysia timur dan Brunei Darussalam. Laut China Selatan memiliki empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang yang sangat terkenal yakni, Paracel, Sparty, Pratas dan kepulauan Maccalesfield.¹

Laut China Selatan dikenal kaya akan hasil perikanan yang menjadi sumber gizi penduduk di sekitar perairan Laut China Selatan. Menurut perkiraan Tiongkok kawasan Laut China Selatan memiliki kandungan minyak tidak kurang dari 105 hingga 213 milyar barel. Sementara perkiraan *U.S Geological Survey* kandungan minyaknya tidak lebih dari 28 milyar barel.² Selain itu perairan tersebut juga dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan laut paling strategis. Laut China Selatan menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, artinya laut tersebut menghubungkan jalur transportasi dan perdagangan antar kawasan, dari Timur Tengah, Eropa dan Asia. Lebih dari empat puluh ribu kapal melewati jalur tersebut setiap tahunnya termasuk jalur utama bagi kapal-kapal minyak dari Timur Tengah yang menyuplai kebutuhan minyak ke berbagai negara. Jepang juga menjadi negara yang menggunakan jalur Laut China Selatan dalam memenuhi kegiatan ekonominya. Bahkan Amerika juga membutuhkan

¹ Asnani Usman; Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, CSIS, Jakarta, 1997, hal.1

² Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 204

stabilitas jalur laut di kawasan Laut China Selatan bagi kelancaran kapal-kapal perangnya di kawasan tersebut.³

Prinsip yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan, namun prinsip kebebasan juga harus dilengkapi dengan tindakan pengawasan agar kepentingan negara yang terdapat dilaut lepas dapat terjamin. Berdasarkan prinsip kebebasan ini, setiap negara yang berpantai ataupun tidak berpantai dapat menggunakan laut lepas, dengan syarat mematuhi ketentuan Hukum Internasional. Dalam konvensi Janewa 1958, laut pada intinya dibagi dalam 2 kawasan, yaitu kawasan territorial dan laut lepas tidak satu negara pun yang dapat menuntut kedaulatan terhadap laut lepas karena terdapat prinsip kebebasan dilaut lepas, artinya penggunaannya terbuka untuk semua negara. Kebebasan yang dimaksud meliputi kebebasan berlayar, menangkap ikan, penerbangan dan kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel di bawah laut. Namun dalam melaksanakan kebebasan tersebut, negara diwajibkan untuk memperhatikan kebebasan terhadap negara lain.⁴

2. Sejarah Sengketa Kawasan Laut China Selatan

Dari keempat gugusan pulau yang dipersengketakan, Kepulauan Spratly menjadi “titik api” untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer di masa mendatang, tidak hanya adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan keenam penuntutnya. Keenam penuntut tersebut antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan dan Tiongkok. Negara Jepang, AS dan beberapa negara yang akan bersinggungan pada kawasan tersebut pun tidak dapat dipungkiri dapat teribat dalam kepentingan menyangkut di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan.⁵

³ Bambang Cipto, *Op.Cit*, hal. 205

⁴ Tues Kindyana, *Op.Cit*, hal. 29-30

⁵ Asnani Usman; Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, CSIS, Jakarta, 1997, hal.4

Persoalan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya yang langka seperti minyak, ikan dan sampai tingkat transportasi, mengakibatkan konflik di kawasan. Minyak bumi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini menjadi incaran utama untuk diperebutkan sehingga tidak dapat dilepaskan dari konflik militer. Hal tersebut cukup jelas menggambarkan kondisi geografis perairan Laut China Selatan dan akan menjadi sangat strategis apabila dimiliki oleh salah satu negara penuntutnya.

Negara – negara yang terlibat sengketa telah mengajukan tuntutan masing-masing atas kepulauan Spratly dan bagian lain di perairan Laut China Selatan berdasarkan sejarah, penemuan, pendudukan sementara atau berulang dan pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau sejak berabad-abad lalu. Dasar tuntutan ini menjadi semakin rumit dengan adanya pendudukan pulau-pulau Spratly oleh Perancis pada abad 19 dan 20 serta Jepang pada abad 20. Kekalahan Jepang dan tercapainya perjanjian perdamaian Fransisco tahun 1951 tidak menyertakan penyerahan pulau Spratly dan pulau lainnya kepada negara mana. Sehingga Tiongkok, Vietnam dan Taiwan menuntut bahwa kepulauan itu adalah wilayah mereka.⁶ Diikuti Filipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari milik negaranya dan menyangkut kepentingan nasionalnya.

Sejak tahun 1970 klaim terhadap kawasan tersebut terus meningkat sejalan dengan dengan perkembangan di bidang penemuan dan hukum internasional. Perkembangan pertama menyangkut ditemukannya ladang minyak di kawasan tersebut. Penemuan ini sudah tentu membuat harga kepulauan dan pulau kecil serta batu karang di kawasan tersebut meningkat tajam. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari *United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS)*.⁷

⁶ Asnani Usman; Rizal Sukma, *Loc. Cit*

⁷ *Ibid.*

Terbukanya sebuah peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan Laut China Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut internasional. Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka klaim, bahkan memberi konsesi pada perusahaan-perusahaan minyak asing, untuk melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang mereka klaim masing-masing.⁸

Persaingan dalam proses pernyataan hak ini berkembang menjadi konflik militer khususnya Tiongkok dan Vietnam tahun 1974 hingga 1988. Tiongkok bahkan secara terbuka mendirikan bangunan yang di sertai dengan sistem komunikasi canggih dan tempat pendaratan helikopter. Perkembangan tersebut menunjukkan dengan jelas besarnya kepentingan Tiongkok di kepulauan Spratly. Perseteruan antara Tiongkok dan Vietnam lebih banyak disebabkan oleh isu tambang minyak. Sedangkan konflik antara Tiongkok dan Filipina lebih disebabkan oleh persaingan dalam perebutan hasil ikan di kawasan.⁹

Pada tahun 1992 Senat Filipina menolak pembaruan perjanjian basis militer (*Military Bases Agreement*) antara Filipina dan Amerika Serikat. Penarikan pasukan negara adidaya dari kawasan Asia Tenggara membuka jalan bagi Tiongkok untuk dapat lebih leluasa di kawasan tersebut. Akan tetapi rangkaian peristiwa tersebut mengakibatkan meningkatkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan sebab pemerintah Tiongkok pada Februari 1992 memutuskan seluruh kawasan Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Keputusan ini memungkinkan Tiongkok menggunakan kekerasan untuk mengusir setiap negara yang

⁸ Bambang Cipto, *Loc Cit*

⁹*Ibid.*

memasuki kawasannya ataupun mengganggu kepentingan nasional Tiongkok.¹⁰

3. Dinamika Sengketa Laut China Selatan

Perkembangan sengketa Laut China Selatan semakin meningkat sejak awal tahun 1995, dimana nelayan Filipina menyatakan melihat sebuah bangunan yang dilengkapi alat komunikasi didirikan di Mischief Reef yang jauh memasuki kawasan yang telah diklaim Filipina. Hal ini membuat Filipina merasa kecewa ditambah lagi dengan insiden pendudukan dua pulau terumbu karang oleh Malaysia bulan Mei 1999. Filipina pun meletakkan kecurigaannya terhadap kunjungan Malaysia ke Tiongkok, akan memperkuat dugaan tentang adanya koalisi kedua negara tersebut dan memungkinkan terjadinya kerugian bagi pemerintah Filipina. Rangkaian kekecewaan membuat Filipina kembali menggantungkan kebutuhan keamanan nasionalnya pada Amerika. Tahun 1999 Senat Filipina meratifikasi perjanjian keamanan (*Visiting Forces Agreement*) dengan Amerika. Langkah Filipina ini membuat kedua negara kembali menyelenggarakan latihan militer bersama dan pasukan Amerika pun kembali mendapatkan akses ke wilayah Filipina.¹¹

Isu sengketa kembali memanas pada awal tahun 2010. Potensi kekayaan sumber daya alam yang terkandung di Laut China Selatan membuat Tiongkok sangat terobsesi menjadikan Laut China Selatan bagian dari kekuasaannya dan kepentingan nasional mereka. Kepulauan Spratly dan Paracel beserta perairan di lepas pantainya dianggap memiliki kandungan minyak dalam jumlah yang menguntungkan secara ekonomi.

¹⁰ Bambang Cipto, *Op.Cit*, hal. 210-211

¹¹ Bambang Cipto, *Op.cit*. hal.214-215

Klaim atas wilayah ini bereskalasi seiring dengan meningkatnya nilai sumber dayanya.¹²

Gambar 2. Potensi Sumber Daya Alam Dan Tumpang Tindih Klaim Kepemilikan Di Laut China Selatan



Sumber: <http://www.japanfocus.org/data/schinasea.gif>
diakses pada 8 November 2017

Berdasarkan gambar diatas, garis-garis klaim dari berbagai negara saling tumpang tindih, mengakibatkan zona ekonomi eksklusif setiap tiap negara akan saling terganggu. Gambar tersebut juga menunjukkan kandungan minyak dan gas yang ditandai dengan segitiga berwarna hijau. Sumber daya alam tersebut menjadi alasan negara-negara yang bersengketa untuk mempertahankan klaimnya tersebut.

¹² Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Globa Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.213-214

Malaysia, Vietnam, Taiwan, Filipina berusaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan keamanannya. Seperti halnya Tiongkok yang saat ini merupakan negara yang juga terlibat dalam sengketa tersebut telah berkembang menjadi salah satu kekuatan militer dan ekonomi besar di Asia, bahkan di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi yang cukup besar. Tiongkok saat ini membutuhkan banyak suplai energi untuk menopang kelangsungan industrinya. Kandungan minyak yang ada di Laut China Selatan akan menjadi salah satu kepentingan Tiongkok. Diantara negara-negara yang memperebutkan klaim atas wilayah di Laut China Selatan, Tiongkok menjadi negara terkuat dibandingkan lima negara lain dalam kekuatan militer.¹³

Laut China Selatan kini telah menjadi salah satu *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan tersebut, tidak hanya melibatkan enam negara saja, akan tetapi juga menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan seperti Jepang dan Amerika Serikat. Akibatnya sengketa Laut China Selatan tidak lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumber daya alam, tetapi telah merambah pada isu kebebasan bernavigasi. Hal ini tentu akan berdampak pada konflik yang lebih luas.

Saat ini banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di sekitar wilayah Laut China Selatan baik yang berkonflik secara langsung maupun tidak untuk mencari solusi damai atas permasalahan tersebut. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan kondisi damai di wilayah tersebut, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan dari semua pihak mengenai kepemilikan perairan tersebut. Kekhawatiran ini tampak semakin nyata saat Vietnam menjadwalkan menggelar latihan perang angkatan laut dengan menggunakan peluru tajam pada 13 Juni 2011 di Laut China Selatan, pada saat ketegangan dengan Tiongkok

¹³ Angga Nurdin Rachmat, *Loc. Cit.*

mencapai titik tertinggi karena meningkatnya sengketa maritim. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas serta mengancam perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia.¹⁴

B. Keterlibatan Jepang Dalam Konflik Laut China Selatan

Isu keamanan kembali menjadi perbincangan hangat dikalangan publik internasional. Tidak terlepas bagi Jepang, isu keamanan menjadi hal yang harus diwaspadai Jepang. Untuk pertama kalinya, Jepang mengirimkan 1000 pasukan SDF ke Irak pada Februari tahun 2004. Hal ini menjadi sejarah penting dalam kebijakan luar negeri Jepang dan menandakan peningkatan respon Jepang terhadap isu-isu keamanan dunia. Meskipun tetap mendapat kritik dari dalam negeri dan masyarakat internasional. Secara teknis SDF Jepang bukan sebagai pasukan penyerangan atau *non-combatant*, misi ini lebih kepada memenuhi kebutuhan pasukan sekutu, seperti kebutuhan air, tenaga medis, pembangunan sekolah dan infrastruktur di zona perang. Selain itu, Jepang menyumbangkan dana sebesar \$5 milyar.¹⁵ Hal ini membuktikan Jepang berupaya membangun kembali sistem pertahanan yang mandiri sehingga dapat terlibat dalam isu-isu keamanan global.

Keterlibatan Jepang dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan membuat Jepang aktif dalam menyerukan perdamaian. Akan tetapi ketegangan yang bisa meningkat dari waktu ke waktu menjadi konflik yang lebih besar dapat mengganggu lalu lintas maritime Jepang. Ini menjadi berita

¹⁴ Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Globa Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.215-216

¹⁵ Balbina Hwang, *The Heritage Foundation* 2004 <http://www.heritage.org/asia/report/japans-troop-dispatch-iraq-the-end-checkbook-diplomacy>

buruk bagi keamanan ekonomi Jepang sejak jalur Laut China Selatan digunakan oleh Jepang untuk membawa barang-barang Jepang ke pasar yang menguntungkan di Asia Tenggara dan Eropa dan 90% dari impor minyak mentah Jepang melewati perairan tersebut.¹⁶ Namun sebelum Jepang dapat mengamankan kepentingannya terkait Laut China Selatan, Jepang memerlukan perubahan bagi kebijakan pertahanannya, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Perdana Menteri baru Jepang.

1. Perubahan Kebijakan Negara Jepang

Pada bulan September 2006, Shinzo Abe terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru membawa angin segar dalam penguatan keamanan Jepang dengan melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Shinzo Abe dipilih oleh parlemen Jepang dengan perolehan suara sebanyak 339 suara dari 475 suara keseluruhan di Majelis Rendah dan berhasil mendapatkan suara mayoritas di Majelis Tinggi. Shinzo Abe juga ketua dari salah satu partai besar di Jepang yaitu Liberal Democratic Party (LDP) yang memiliki fokus kebijakan dalam hal keamanan. Hal ini terlihat dari upaya-upaya Shinzo Abe yang ingin meningkatkan peran Jepang dalam isu keamanan global melalui perubahan pada Pasal 9 Konstitusi Jepang. Konstitusi yang melarang Jepang untuk terlibat perang dan membatasi ruang gerak militer Jepang, SDF hanya memiliki hak mempertahankan diri. Abe berharap amandemen terhadap Pasal 9 tersebut dapat meningkatkan kekuatan militer Jepang dan memiliki hak pertahanan keamanan secara kolektif dan berhak mempersenjatai diri.¹⁷

Upaya perombakan konstitusi Jepang tentang keamanan ini memunculkan perdebatan di dalam negeri Jepang. Isu

¹⁶ Tues Kindyana, *Op.Cit*, hal.45

¹⁷ Welle Deutsche, *Shinzo Abe Dipilih Sebagai Perdana Menteri Jepang*, <http://m.dw.com/id/shinzo-abe-dipilih-sebagai-perdana-menteri-jepang/a-2935242>, diakses pada 7 Desember 2017

amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang ini menuai pro dan kontra di kalangan publik Jepang. Pada awal tahun 2007 Badan Pertahanan Jepang atau *Japan Defense Agency* yang semula posisinya berada dibawah kabinet diganti dan dinaikkan statusnya menjadi sebuah Departemen Pertahanan Jepang atau *Japan Ministry of Defense*. Perdana Menteri Shinzo Abe menunjuk Fumio Kyuma untuk memegang tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan Jepang yang pertama. Fumio Kyuma yakin bahwa peningkatan status Badan Pertahanan menjadi sebuah Departemen akan memberikan dampak signifikan terhadap organisasi administratif yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dasar suatu negara yaitu “pertahanan nasional” khususnya tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan pertahanan Jepang. Melalui transisi tersebut dan peningkatan kerjasama perdamaian internasional, Jepang akan secara aktif menunjukkan pertahanan nasional dan perdamaian internasional.¹⁸

Untuk kedua kalinya Shinzo Abe dipilih kembali oleh parlemen Jepang sebagai Perdana Menteri pada 26 Desember 2012. Kedudukan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri pada periode pertama di tahun 2006 hanya bertahan selama satu tahun hingga tahun 2007 karena menderita sakit. Shinzo Abe mendapat dukungan sebanyak 328 suara dari total 480 anggota Majelis Rendah Jepang. Kebijakan Shinzo Abe saat itu terfokus pada perekonomian Jepang, namun bukan berarti kepemimpinannya mengabaikan aspek pertahanan dan keamanan nasional. Bersamaan dengan itu Departemen Pertahanan Jepang mengeluarkan kebijakan baru berupa peningkatan anggaran belanja militer Jepang sebesar \$49 milyar, anggaran tersebut untuk meningkatkan kapabilitas

¹⁸ Ministry of Defense, dalam <http://www.mod.go.jp/e/about/remarks/2007/press01.html>, diakses pada 7 Desember 2017

militer dalam upaya pengawasan pulau-pulau yang berada di wilayah terluar territorial Jepang.¹⁹

2. Kerjasama Keamanan Jepang dan Filipina di Laut China Selatan

Filipina memiliki tiga komponen utama yakni potensi wilayah, energi dan kekuatan (*power*). Pertama, dari segi wilayah batasan-batasan wilayah Filipina yaitu, sebelah utara terdapat Taiwan, timur terbentang Samudera Pasifik, sebelah Selatan berdekatan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan sebelah barat Filipina berhadapan dengan Laut China Selatan. Filipina lebih dekat dengan kepulauan Spratly.²⁰ Kawasan sengketa ini berada sejauh 160 km dari daratan Filipina. Adapun wilayah Filipina diperkuat dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut untuk *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE).²¹ Hal ini berdasarkan pada konvensi PBB dalam hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang di adopsi tahun 1982.

Kedua, Filipina mendapatkan sumber energi tambahan dari kemenangan kasus Laut China Selatan melalui Mahkamah Permanen Arbitrase. Pengadilan tersebut memperjelas hak kedaulatan yang dimiliki Filipina untuk dapat mengakses minyak dan gas di lepas pantai Zona Ekonomi Eksklusif. Meskipun demikian, Filipina sendiri telah memiliki sumber utama gas alam yang berada di Malampaya.²² Ketiga, kekuatan

¹⁹ Ministry of Defense, *Loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Text Convention on the Law of The Sea UNCLOS* hal. 38-40

²² *Cina-Filipina Kelola Sumber Energi di Laut Cina Selatan* dalam <https://m.tempo.co/read/news/2017/07/26/118894696/cina->

militer Filipina memang tidak sekuat pasukan yang dimiliki Tiongkok. Namun militer Filipina yang berada di bawah payung pemerintahan Amerika Serikat mendapatkan bantuan keamanan. Filipina mendapatkan dana alokasi militer terbesar Amerika Serikat. Dana bantuan tersebut dimanfaatkan Filipina untuk membangun Angkatan Laut dan Udara dalam menjaga laut China Selatan.²³

Dari ketiga komponen yang dimiliki Filipina, Jepang berkeinginan untuk melakukan berbagai kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama bertujuan menjaga pertahanan dan keamanan Negara di Laut China Selatan. Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina pada tahun 2013 sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional. Jepang menggunakan Filipina untuk dapat terlibat di Laut China Selatan.

Sengketa Laut China Selatan menjadi dasar kepentingan nasional suatu negara untuk melakukan klaim di kawasan perairan dengan potensi laut yang begitu besar dan menjanjikan akan sumber daya alam yang tersimpan didalamnya. Klaim wilayah Laut China Selatan yang tidak hanya dilakukan oleh dua atau tiga negara ini menyebabkan penyelesaian sengketa laut tersebut semakin sulit untuk dilepaskan. Para *claimants* tidak hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan kepulauan tersebut dan kemudian memindahkan penduduknya ke pulau itu, melainkan adanya faktor ekonomi dalam memperebutkan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di kawasan tersebut. Kemajuan dan kemakmuran ekonomi negara-negara di Asia membuat perlunya mengeksplotasi sumberdaya alam dari laut agar dapat menambah devisa negara.

Pemerintah Jepang pada tahun 2014 memperbaharui dan menerbitkan buku putih pertahanan Jepang yang di dalamnya

filipina-kelola-sumber-energi-di-lau-cina-selatan, diakses pada 1 Agustus 2017

²³ Koran Kompas Internasional, *Filipina di Atas Angin*, 26 November 2015

memuat sejumlah persoalan yang berada di sekitar Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, serta peningkatan potensi-potensi masalah lainnya yang berkaitan dengan wilayah, kedaulatan, ataupun kepentingan ekonomi maritim. Buku Putih Jepang menjelaskan mengenai agresifitas militer Tiongkok sebagai sumber ancaman.

Keamanan dan Keselamatan jalur pelayaran atau *sea lanes of communication* (SLOC) yang melewati Laut China Selatan, dewasa ini mulai terganggu sehubungan dengan potensi konflik yang selama berpuluh tahun terpendam kini mulai muncul ke permukaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, hukum internasional dan lainnya, ditambah dengan bertambahnya aktor yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Apabila dikaji secara mendalam, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan dijalur pelayaran tersebut hanyalah akibat dari pertikaian masalah kepemilikan terhadap dua buah gugusan pulau yang berada di kawasan Laut China Selatan, yakni Kepulauan Spratly dan Paracel.²⁴

Pada bulan April 2012 Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan seperti yang terjadi di Scarborough Shoal, memang lampu kuning menuju Perang Perpanjangan tangan *Proxy War* antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, atau pada skala yang lebih luas, di kawasan Asia Pasifik. Jepang cukup beralasan untuk berbagi kecemasan bersama Filipina menyusul semakin agresifnya militer Tiongkok di Asia Pasifik. Berdasar studi *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) 2010, Tiongkok merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar.

Menteri Luar Negeri Jepang dan Filipina pada 1 Oktober 2013 setuju untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Menteri luar negeri Jepang Fumio Kishida dan

²⁴ Willy F. Sumakul, *Potensi Konflik Laut Cina Selatan*, dalam <http://www.fkpmaritim.org?p=250>, diakses tanggal 7 Desember 2017

Menteri luar negeri Filipina Albert del Rosario menyepakati dialog kebijakan penguatan, meningkatkan kerjasama maritim dan langkah - langkah lainnya. Albert del Rasio mengatakan bahwa Ketika lingkungan strategis di wilayah ini berubah, maka perlu bagi Jepang dan Filipina sebagai Menteri Luar Negeri untuk berbagi pengakuan situasi, meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara, dan bekerja sama menuju serta membentuk perdamaian dan kesejahteraan di Asia Pasifik.²⁵

Menanggapi langkah pemerintah Tiongkok yang semakin agresif dalam mengklaim teritorialnya, Pemerintah Filipina dan Jepang meratifikasi perjanjian kerjasama anti-senjata kimia hingga lima tahun ke depan. Perjanjian ini juga diikuti pemberian 12 kapal patroli baru dan bantuan finansial kepada Angkatan Laut Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Del Rosario menyatakan, pihaknya menginginkan Jepang untuk memasang senjata dan memperbaiki kemampuan armada penjaga pantai mereka. Jepang dan Filipina memperketat kerjasama keamanan pada Januari 2015 dengan menggelar latihan gabungan angkatan laut pertama di Laut China Selatan. Filipina dan tim penjaga pantai Jepang melaksanakan latihan anti-pembajakan di Filipina. Latihan gabungan ini terjadi di tengah kecaman internasional terhadap reklamasi Tiongkok di sekitar tujuh terumbu di Kepulauan Spratly dan kekhawatiran militer Filipina bahwa Tiongkok akan mencoba memaksakan zona eksklusif di atas wilayah yang disengketakan.²⁶

²⁵ Yesi Syelvia, *Jepang-Filipina Tingkatkan Kerjasama Maritim*, Wartananews <http://www.wartanews.com/internasional/e55e48d2-85de-ab32-e57b-8bd7d6cacfa5/jepang-filipina-tingkatkan-kerjasama-maritim>, diakses tanggal 14 Oktober 2017.

²⁶ Amanda P. Sari, Amanda P Sari, *Jepang, Filipina dan Vietnam Kerjasama di Laut China Selatan*, CNN Indonesia <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150512163045-113-52845/jepang-filipina-dan-vietnam-kerja-sama-di-laut-china-selatan/>, diakses pada 8 Desember

Jepang dan Filipina terus berupaya meningkatkan kualitas kerjasama mereka. Dengan mundurnya pasukan Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan membuat Filipina memerlukan kerjasama dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Disamping itu, alasan Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina terkait sengketa Laut China Selatan tersebut akan dibahas dan dibicarakan pada bab selanjutnya. Segala hal yang menjadi motivasi Jepang berupa perubahan kondisi sistem internasional akan dibahas secara teoritik dan lebih mendalam.